

**PENGARUH PENDIDIKAN DAN LATIHAN TERHADAP
KINERJA PEGAWAI**

**(Penelitian pada Sub Bagian Keuangan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Disusun Oleh:
Risdianto
Nim: 09 852 0016**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

LEMBAR PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH PENDIDIKAN DAN LATIHAN TERHADAP KINERJA
PEGAWAI (Penelitian Pada Bidang Keuangan Dinas Penataan Ruang
Dan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara)

NAMA : RISDIANTO

NPM : 098520016

JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

PROGRAM STUDI : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

MENYETUJUI :
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

DRS. H. SYAFARUDDIN RITONGA, MAP

PEMBIMBING II

DRS. INDRA MUDA, MAP

UNIVERSITAS DEKAN

DRS. H. IRWAN NST, S.Pd, MAP

ABSTRAKSI
PENGARUH PENDIDIKAN DAN LATIHAN TERHADAP KINERJA
PEGAWAI (Penelitian pada Sub Bagian Keuangan Dinas Penataan Ruang dan
Permukiman Provinsi Sumatera Utara)
Risdianto

Semakin dinamisnya kebutuhan manusia menyebabkan sistem pelayanan harus dilakukan secara lebih luas dan spesifik. Untuk menciptakan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan melalui sistem pendidikan dan latihan (Diklat). Permasalahan dalam penelitian ini adalah, apakah pegawai yang diikutsertakan mengikuti Diklat memiliki latar belakang yang relevan dengan jabatan atau pekerjaannya, apakah pegawai yang telah selesai mengikuti Diklat memiliki kinerja atau prestasi kerja yang lebih baik dari pada sebelum mengikutinya. Menurut penelitian, Untuk mengirimkan pegawai mengikuti pendidikan dan latihan, disesuaikan dengan jumlah personil sehingga dengan pengirimannya mengikuti Diklat tidak menghambat pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian keuangan. Setelah selesai mengikuti Diklat tersebut personil memiliki kemampuan kerja yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum mereka mengikutinya. Dinamisasi dan volume pekerjaan yang dihadapi setiap tahun semakin dinamis, hal ini tidak hanya di lingkungan Sub Bagian Keuangan akan tetapi juga pada Sub Bagian atau Bidang-bidang pekerjaan lainnya. Untuk dapat menghadapi pekerjaan yang semakin variatif tersebut, dikirim beberapa orang pegawai untuk mengikuti pendidikan dan latihan baik yang diselenggarakan di Sumatera Utara maupun di luar Sumatera Utara. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu, Pegawai yang diikutsertakan mengikuti Diklat umumnya sudah memiliki latar belakang yang relevan dengan jabatan atau pekerjaannya. Pegawai yang telah selesai mengikuti Diklat pada umumnya memiliki kinerja atau prestasi kerja yang lebih baik dibandingkan sebelum mereka mengikutinya. Penyelenggaraan Diklat berupa Diklat dalam jabatan, diklat khusus dan bentuk sosialisasi yang berhubungan dengan pekerjaan pegawai sehari-hari. Untuk menjaga kontinuitas pelayanan publik pada Sub Bagian Keuangan, pegawai yang dikirim mengikuti Diklat disesuaikan dengan volume kerja.

Kata Kunci: 1. Pengaruh Diklat Terhadap Kinerja Pegawai.

KATA PENGANTAR

Assalamualaiukum, Wr.Wb.

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul, PENGARUH PENDIDIKAN DAN LATIHAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Penelitian pada Sub Bagian Keuangan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara), Salawat beriring salam tidak lupa penulis sampaikan keharibaan junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak menemukan hambatan, namun berkat bimbingan dan pengarahan yang diberikan Dosen Pembimbing, akhirnya penulisan skripsi ini dapat dirampungkan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. H. Syafruddin Ritonga, MAP selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak membantu penulis untuk mengarahkan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Indra Muda, MAP selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Staf Pengajar dan civitas akademik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak membekali penulis dari berbagai disiplin ilmu dan pelayanan akademik selama mengikuti perkuliahan.
5. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Kepala Sub Bagian Keuangan dan para pegawai yang telah banyak membantu penulis memberikan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Istri tercinta dan ananda yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Kepada rekan-rekan yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini disampaikan terima kasih.

Penulis sangat menyadari kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan pembaca.

Medan, Januari 2013

Penulis



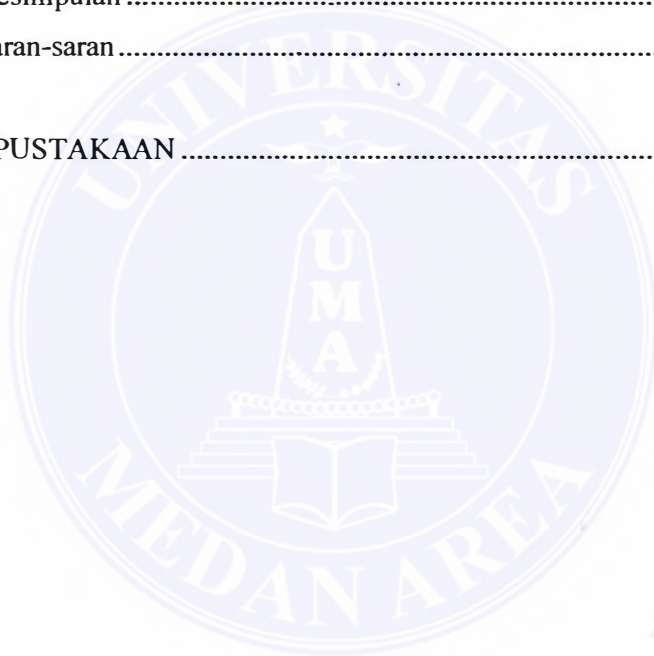
Risdianto



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Pemikiran.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kebijakan Diklat	8
B. Sumber Daya manusia	12
C. Analisis Jabatan.....	18
D. Spesifikasi Jabatan	22
E. Motivasi.....	25
F. Kinerja Pegawai	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi Penelitian	34
B. Populasi dan sampel	34
C. Metode Pengumpulan Data.....	35
D. Teknik Analisa data.....	36
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	39
A. Sejarah Singkat Sub Bagian KeuanganDistarukim Provsu	39
B. Struktur Organisasi.....	43

	C. Jumlah Pegawai pada Sub Bagian keuangan	46
BAB	V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
	A. Hasil Penelitian	50
	1. Relevansi Diklat Dengan Jabatan Peserta Diklat.....	50
	2. Kinerja Pegawai Setelah Mengikuti Diklat	54
	B. Pembahasan.....	56
BAB	VI PENUTUP	60
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran-saran.....	60
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	62



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel:

1. Kepala Sub Bagian keuangan Dari Tahun 2001-2012.....	42
2. Jumlah Pegawai Sub Bagian Keuangan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Pada tahun 2012	48
3. Pegawai Sub Bagian Keuangan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang mengikuti Diklat tahun 2012.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin dinamisnya kebutuhan manusia menyebabkan sistem pelayanan harus dilakukan secara lebih luas dan spesifik. Sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi jabatan untuk menyelenggarakan tugas-tugas negara. Untuk menciptakan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan melalui sistem pendidikan dan latihan (Diklat).

Mempelajari perkembangan dunia yang sudah mengarah kepada persaingan antar Negara oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, sekaligus menghadapi perubahan yang dinamik dan kompleks, maka tepat sekali pemerintah melakukan pembangunan di segala bidang, termasuk bidang pengembangan sumberdaya aparatur guna menghadapi tantangan dimaksud.

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang cepat mau tidak mau harus dihadapi bangsa Indonesia. Jika tidak, Indonesia akan tertinggal dari Negara-negara lainnya. Hal ini tentu memerlukan pengembangan sumber daya aparatur sedemikian rupa seperti dikemukakan Kristiadi, (1997:22) bahwa “sumberdaya aparatur mempunyai kedudukan yang sangat penting karena mereka sekaligus melaksanakan fungsi sebagai perumus, perencana, pelaksana dan pengawas kegiatan pembangunan”.

Sebagai perumus, perencana, pelaksana dan pengawas pembangunan, berarti peran dan fungsi aparatur pemerintah dalam pembangunan menduduki tempat yang sangat strategis. Untuk dapat melaksanakan tantangan tersebut, seluruh aparatur pemerintah dituntut untuk memiliki, menguasai, dan mempraktekkan ilmu pengetahuan, ketrampilan, serta perilaku yang baik. Jika suatu organisasi ingin mencapai tujuannya secara efektif dan efisien maka pengetahuan yang tinggi seluruh staf organisasi terhadap pelaksanaan tugasnya merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kemampuan atau kualitas aparatur ini adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Kualitas aparatur tidak mungkin meningkat tanpa ada usaha-usaha konkrit untuk meningkatkannya. Oleh karena itu, Diklat aparatur baik yang bersifat struktural maupun fungsional, perlu terus ditingkatkan agar aparatur benar-benar mampu berfungsi sebagai fasilitator, motivator, bahkan sebagai pelaksana, pelopor, dan penggerak pembangunan (*agent of change*).

Pengembangan sumberdaya manusia khususnya bagi aparatur Negara pada intinya adalah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi pemerintah yang terutama ditekankan pada kebutuhan masyarakat secara luas, dan ini juga tidak terlepas dari kemampuan kepemimpinan aparatur Negara. Artinya, diperlukan adanya aparatur Negara selaku manajer yang mampu melakukan proses kegiatan melalui kepemimpinannya dengan pendekatan manajemen dalam menggerakkan bawahannya. Dengan kata lain, manajemen merupakan jenis pemikiran yang

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 1990. *Analisis Kebijaksanaan Negara*. Rineka Cipta, Jakarta.
- . 1997. *Evaluasi Kebijakan Publik*, IKIP Malang
- . 1998. *Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi*. FIA Unibraw, Malang.
- Dunn, William. N, (2000), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajahmada, University Press. Yogyakarta.
- Islamy, Irfan M. 1992. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bina Aksara, Jakarta.
- Kristiadi, J. B. 1997. *Perspektif Administrasi Publik Menghadapi Tantangan Abad 21. Dalam Jurnal Administrasi Pembangunan* Vol. 1 No. 2. 1997 Jakarta: PP. Persadi
- Mochtar, R. Sutarto. 2000. *Pengaruh Kebijakan Pendidikan dan pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama Terhadap Derajat Kemampuan manajerial pada Lembaga Administrasi Negara*. Tesis Pascasarjana UNPAD: Bandung
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Pamudji, S. 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rustandi, R. Achmad. 1992. *Gaya Kepemimpinan Pendekatan Bakat Situasional*. Bandung: Armico
- Siagian, Sondang P. 1994. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suradinata, Ermaya. 1997. *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah: Pendekatan Budaya, Moral, dan Etika*. Jakarta: PT Gramedia.
- Syamsi, I. 1995. *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 1988. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali
- Winardi. 1995. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Bandung: Nova

2. Dokumen dan Sumber-sumber Lain

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah.*

